Vol.18.1. Januari (2017): 674-704

# PENGARUH PPN, PPnBM, DAN PKB TARIF PROGRESIF PADA DAYA BELI KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT

## Sang Ayu Putu Devi Pramesti<sup>1</sup> Ni Luh Supadmi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail: devipramesti2802@gmail.com/ +6282237461588

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

#### **ABSTRAK**

Sumber pendapatan negara memiliki pengaruh yang cukup besar pada pembangunan suatu negara adalah pajak. Pajak yang dipungut akan digunakan untuk pembangunan suatu negara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh PPN, PPnBM, serta PKB tarif progresif pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Penelitian dilaksanakan di kantor SAMSAT Bersama Denpasar dan Showroom kendaraan bermotor roda empat di Kota Denpasar tahun 2016. Sampel penelitian sebanyak 100 orang dari 209.261 orang yang merupakan seluruh wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak di kantor SAMSAT Bersama Kota Denpasar Tahun 2015 dan konsumen potensial di Showroom kendaraan bermotor roda empat di Kota Denpasar yang diperoleh dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yakni analisis regresi linier berganda. Hasil analisis yaitu pengenaan PPN dan PPnBM mempunyai pengaruh positif signifikan, serta PKB tarif progresif mempunyai pengaruh negatif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

**Kata kunci**: pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak kendaraan bermotor, daya beli

## **ABSTRACT**

Sources of income countries have a considerable influence on the development of a country is a tax. Taxes collected will be used for the construction of a negara. Tujuan study was to determine the effect of VAT, luxury sales, and vehicle tax with progressive rates on consumer purchasing power automobiles. Research conducted at the office of the Joint SAMSAT and Showroom in Denpasar 2016. The research sample of 100 people from the 209 261 people who constitute the whole taxpayers make tax payments at the office SAMSAT Joint Denpasar in 2015 and potential consumers in Showroom in Denpasar obtained by the method nonprobability sampling with purposive sampling technique. Data analysis techniques that multiple linear regression analysis. The results of analysis, the imposition of VAT and sales tax on luxury has a significant positive effect, and vehicle tax with progressive rates have a significant negative influence on consumers' purchasing power on automobiles.

Keywords: value-added tax, sales tax on luxury goods, motor vehicle tax, the purchasing power

## **PENDAHULUAN**

Sumber pendapatan negara yang memiliki pengaruh yang cukup besar pada pembangunan suatu negara adalah pajak. Dengan membayar pajak, masyarakat secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajibannya sebagai warga negara yaitu kewajiban dibidang berpajakan yang nantinya akan digunakan untuk

pembangunan suatu negara. Pendapatan suatu negara yang berasal dari pajak, baik pajak pusat ataupun pajak daerah digunakan untuk pembangunan di segala bidang. Sehingga, pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak dengan berbagai macam cara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan sumbangan yang besar bagi pendapatan negara. PPN dikenakan disetiap kegiatan mengkonsumsi barang atau jasa di daerah pabean. PPN dikenakan pada setiap tingkat kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang dan atau jasa. Claudya (2015) dan Febe (2015) menyatakan bahwa PPN tidak mempunyai pengaruh terhadap daya beli konsumen. Dyah (2010) menyatakan PPN mempunyai pengaruh positif pada daya beli konsumen. Lain halnya dengan Fandy (2014) dan Raja (2014) yang menyatakan bahwa PPN mempunyai pengaruh positif pada daya beli konsumen.

Menurut Fadilah (2012) Pajak Pertambahan Nilai (PPnBM) adalah pajak yang kurang populer di masyarakat umum. Sebab karakteristik dari PPnBM adalah pungutan lain selain. PPnBM terkandung didalam harga pokok barang mewah tersebut. Fadilah (2012) mengatakan bahwa PPnBM tidak mempunyai pengaruh pada daya beli konsumen. Namun Raja (2014) menyatakan PPnBM mempunyai pengaruh positif pada daya beli konsumen. Yunita (2015) menyatakan hal yang serupa yaitu PPnBM berpengaruh positif pada daya beli konsumen.

Selain PPN dan PPnBM, pajak yang memberikan kontribusi pada pendapatan suatu negara khususnya pada daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB dikenakan karena kepemilkan dan/atau pengusaan kendaraan bermotor. PKB dipungut oleh masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I. PKB mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan suatu daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah yang bersifat rutin (Yunus, 2010). Alasan diterapkannya PKB dengan tarif progresif adalah penggunaan jalan raya yang digunakan oleh masyarakat. Jumlah kendaraan di Kota Denpasar selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Denpasar dari Tahun 2011 sampai dengan 2015

Tahun	Jumlah (Unit)
2011	164.030
2012	186.142
2013	221.879
2014	199.180
2015	209.261

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Bali, 2016

Berdasarkan Tabel 1, jumlah kendaraan bermotor roda empat di Kota Denpasar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mencapai 980.491 unit (Dispenda Provinsi Bali, 2016). Jumlah kendaraan bermotor roda empat di Kota Denpasar di satu pihak akan menambah pendapatan Pajak Daerah Kota Denpasar dan di lain pihak menambah kemacetan di Kota Denpasar.

Berdasarkan surat edaran Gubernur Bali Nomor 119/1718/Dispenda, tanggal 6 April 2011 tentang Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tarif progresif pada pemilik kendaraan bermotor yang lebih dari satu berdasarkan nama dan/alamat yang sama dengan kartu keluarga dengan tarif kepemilikan senilai 1,5 persen terhadap nilai jual bagi kepemilikan pertama, 2 persen bagi kepemilikan kedua, 2,5 persen bagi kepemilikan ketiga, 3

persen bagi kepemilikan keempat, 3,5 persen bagi kepemilikan kelima dan seterusnya.

Pajak progresif mulai diterapkan di Kota Denpasar pada bulan Juni 2014. Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor roda empat yang sudah dikenai pajak progresif sebanyak 9.186 unit pada tahun 2014 dan 13.379 pada tahun 2015. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif di Kota Denpasar disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Penerimaan Pajak Progresif Per Jenis Kendaraan Bermotor Roda Empat di Kota Denpasar

No Jenis Kendaraan –		Juni – Desember 2014		Januari – Desember 2015		
NO	Jems Kendaraan —	Unit	Jumlah	Unit	Jumlah	
1	Sedan	768	1.116.872.800	894	1.334.746.400	
2	Jeep	1.376	2.210.925.650	2.045	3.193.511.950	
3	Minibus	6.922	6.728.883.000	10.271	9.671.187.600	
4	Bus	1	1.050.900	9	9.890.000	
5	Microbus	55	65.359.700	74	153.116.000	
6	Pick Up	64	139.675.700	86	201.183.500	
Jumlah		9.186	10.262.767.750	13.379	14.563.635.450	

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Bali, 2016

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor roda empat yang telah membayar PKB dengan tarif progresif dari bulan Juni – Desember tahun 2014 sebanyak 9.186 unit dan pajak progresif yang dibayar sebesar Rp 10.262.767.750 dan jumlah kendaraan bermotor roda empat yang telah membayar PKB dengan tarif progresif dari bulan Januari – Desember tahun 2015 sebanyak 13.379 unit dan pajak progresif yang dibayar sebesar Rp 14.563.635.450.

Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu (2015) menunjukkan hasil bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumtif masyarakat di Bali. Namun penelitian yang dilakukan

oleh Ratnasari (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu PKB dengan tarif

progresif mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada daya beli konsumen.

Konsumen akan berasa terbebani dengan tarif pajak yang tinggi akibat adanya

kenaikan tarif PKB sesuai dengan julah kendaraan bermotor yang dimiliki,

sehingga konsumen akan melakukan penekanan pada pembelian untuk kendaraan

bermotor roda empat.

Pengenaan PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif akan berdampak pada

daya beli konsumen untuk membeli kendaraan roda empat. Pajak-pajak tersebut

tentunya akan berpengaruh pada harga jual kendaraan bermotor dan dan akan

menimbulkan peningkatan beban akibat adanya Pajak Kendaraan Bermotor

dengan tarif progresif. Peningkatan harga pada kendaraan bermotor roda empat

karena dikenakannya PPN, PPnBM, dan kenaikan untuk membayar PKB dengan

tarif progresif akan membuat masyarakat akan lebih memperhitungkan untuk

membeli kendaraan bermotor roda empat (Putri, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya, peneliti

merasa penelitian ini penting untuk dilakukan kembali hal ini karena hasil

penelitian sebelumnya tentang hubungan antara PPN, PPnBM, dan PKB dengan

tarif progresif dan daya beli masyarakat menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti sebelumnya Putri Ratnasari

(2015) yang mengamati tentang PPN dan PKB pada daya beli konsumen. Peneliti

merasa perlu untuk menambahkan satu variabel bebas yaitu PPnBM hal ini

disebabkan karena PPnBM dan PPN mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.

PPnBM tidak dapat dikenakan secara terpisah dengan PPN. Sehingga judul penelitian ini "Pengaruh PPN, PPnBM, dan PKB Tarif Progresif Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat."

Rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif mempunyai pengaruh pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Tujuan penelitian yakni untuk memberi bukti empiris pengaruh pengenaan PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan praktis dan kegunaan teoritis bagi pihak terkait, yaitu untuk kegunaan teoritis, diharapkan mampu memberi tambahan referensi dan tambahan pengetahuan mengenai teori asas daya beli, teori prestise, dan teori daya beli dapat menjelaskan pengaruh pengenaan PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Kegunaan praktis untuk masyarakat diharapkan dapat menambah informasi serta masukan mengenai tujuan dan dampak dikenakannya PPN, PPnBM, dan PKB dengan tarif progresif pada kendaraan bermotor roda empat. Kegunaan praktis bagi pengambil kebijakan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan mengenai dampak PPN, PPnBM, dan PKB tarif progresif pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Teori asas daya beli adalah teori yang menjelaskan pajak yang diterima suatu negara akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penerimaan negara yang berasal dari pajak, khususnya PPN dan PPnBM

merupakan penerimaan terbesar yang diterima oleh suatu negara dan Pajak

Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif merupakan penerimaan terbesar yang

diterima oleh suatu provinsi. Sebab masyarakat tidak dapat terlepas dari kegiatan

mengkonsumsi barang-barang kebutuhan sehari-hari, khususnya barang-barang

mewah seperti kendaraan bermotor roda empat yang dikenakan pajak-pajak

tersebut.

Prestise adalah sebuah kehormatan atau wibawa yang didapatkan oleh

seseorang karena kemampuannya dalam memiliki berbagai macam hal (terkait

dengan kekayaan ataupun barang prestise) yang kemudian membuatnya menjadi

berbeda atau istimewa bila dibandingkan dengan orang-orang yang ada di

lingkungan sekitarnya. Kepemilikan terhadap suatu barang yang tergolong

mewah, dalam hal ini adalah kendaraan bermotor roda empat tentu saja akan

menambah prestise dari pemiliknya. Semakin mewah kendaraan bermotor roda

empat yang dimiliki, semakin tinggi pula prestisenya. Semakin mewah kendaraan

bermotor roda empat, tentu saja akan menyebabkan nilai pajak yang dikenakan

pada kendaraan tersebut akan semakin tinggi, khususnya PPN dan PPnBM.

Daya beli adalah tingkat kemampuan seseorang ketika mengkonsumsi

suatu barang atau jasa. Daya beli tidak dapat terlepas dari harga suatu barang.

barang yang mempunyai harga yang tinggi akan menyebabkan permintaan barang

tersebut menurun atau daya belinya menurun, namun apabila suatu barang

mempunyai harga yang rendah akan menyebabkan permintaan barang tersebut

akan tinggi atau daya belinya akan semakin tinggi (Putri, 2015).

Pajak ialah pembayaran yang wajib dibayarkan warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang, akan tetapi warga negara tidak mendapatkan balas jasa secara langsung serta akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat di negara tersebut. Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu, fungsi budgeter, fungsi regulerend. fungsi demokrasi, dan fungsi redistribusi (Wirawan dan Richard Burton, 2013:13).

PPN ialah pajak yang dikenai pada setiap konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Subjek PPN adalah pengusaha, PKP, dan siapapun yang menggunakan BKP atau JKP dari luar daerah pabean. Objek PPN adalah BKP dan JKP. Tarif PPN sebesar 10% yang dapat dirubah menjadi paling rendang 5% dan paling tinggi 10% sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Ekspor BKP berwujud, tidak berwujudan, dan ekspor JKP tarif PPNnya sebesar 0%.

PPnBM ialah pajak dikenakan atas penyerahan BKP mewah di daerah pabean ataupun impor BKP mewah. Objek PPnBM adalah penyerahan BKP mewah oleh pengusaha di dalam daerah pabean dan impor BKP mewah. Tarif PPnBM 10% paling rendah dan 200% paling tinggi. Ekspor BKP mewah tarifnya 0% (nol persen).

PKB ialah pajak yang dikenakan karena kepemilikan dan/atau pengusaan kendaraan bermotor. Alasan pemungutan PKB karena penggunaan jalan raya oleh masyarakat. Objek dari PKB yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek PKB yaitu orang pribadi yang mempunyai kendaraan bermotor atau Badan yang mempunyai kendaraan bermotor. Tarif progresif ditetapkan senilai 1,5 persen untuk kepemilikan pertama, kendaraan kedua senilai 2 persen

bagi kendaraan ketiga senilai 2,5 persen, bagi kendaraan keempat senilai 3 persen,

serta bagi kendaraan kelima dan seterusnya senilai 3,5 persen.

Daya beli merupakan kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang

atau jasa. Daya beli satu orang dengan yang lain tentu saja berbeda. Hal itu

disebabkan karena beberapa faktor, seperti perubahan pendapatan konsumen,

perubahan harga barang pengganti, perubahan harga barang komplementer,

perubahan cita rasa konsumen, dan kebijakan fiskal.

PPN merupakan salah satu pajak yang kenakan terhadap konsumsi suatu

barang, khususnya barang kena pajak (Febe, 2015). Penelitian yang dilakukan

oleh Noviane (2015) membuktikan bahwa PPN tidak mempunyai pengaruh pada

daya beli konsumen. Hal ini karena tarif Pajak Pertambahan Nilai yang relatif

kecil tidak akan mempengaruhi daya beli konsumen. Dyah (2010), Fadilah (2012),

dan Raja (2014) mengatakan bahwa PPN mempunyai pengaruh positif signifikan

pada daya beli konsumen. Sebab pajak akan secara langsung dibebankan dalam

setiap konsumsi yang dilakukan konsumen.

Prestise merupakan salah satu kebutuhan seseroang yang bisa didapatkan

dari lingkungannya. Kedudukan yang tinggi akan meningkatkan prestise

seseorang. Kepemilikan kendaraan bermotor roda empat tentu saja akan

menambah prestise pemiliknya. Semakin bagus kualitas dari kendaraan bermotor

roda empat yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula prestise pemiliknya dan

tentu saja akan menyebabkan harga dari kendaraan tersebut semakin tinggi.

Sehingga nilai Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada kendaraan tersebut

akan semakin tinggi pula. Hipotesis pertama penelitian yaitu:

H1: Pengenaan PPN berpengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat di Kota Denpasar.

PPnBM adalah pajak yang dipungut atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang memproduksi BKP yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Hasil penelitian Hapsari (2010) dan Fadilah (2012) menunjukkan pengenaan PPnBM tidak berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Sebab PPnBM akan dikenakan pada barang-barang mewah yang hanya dikonsumsi masyarakat dari golongan ekonomi menengah keatas.

Penelitian Fandy (2014) menunjukkan PPnBM berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen. Semakin tingginya nilai jual suatu kendaraan yang dikenakan PPnBM yang tarifnya lebih tinggi dari Pajak Pertambahan Nilai, atau semakin mewah kendaraan tersebut secara signifikan akan mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor. Penelitian tersebut memliki hasil yang konsisten dengan Claudya (2015) dan Mariska (2015). Gengsi dan daya beli yang sangat menentukan pembelian kendaraan bermotor. Prestise merupakan salah satu kebutuhan seseroang yang bisa didapatkan dari lingkungannya. Kedudukan yang tinggi akan meningkatkan prestise seseorang (Atmodjo, 2012). Walaupun memang belum semua masyarakat yang mengerti benar tentang PPnBM namun tidak menurunkan niat untuk membeli kendaraan bermotor yang tergolong mewah, sebab kebutuhan gengsi sebagai penegasan dari status sosial. Hipotesis kedua penelitian yaitu:

H2: Pengenaan PPnBM berpengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat di Kota Denpasar.

PKB ialah pajak pada kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor. Penelitian Wisnu (2015) menunjukkan hasil bahwa pengenaan Pajak

Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif tidak berpengaruh terhadap perilaku

konsumtif masyarakat di Bali. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif

progresif belum mampu menurunkan perilaku konsumtif masyarakat di Bali.

Namun sebaliknya, penelitian Ratnasari (2015) mengenai pengenaan PKB pada

daya beli konsumen menunjukkan hasil bahwa Pajak Kendaraan Bermotor

berpengaruh negatif signifikan terhadap daya beli konsumen. Sebab peningkatan

beban pajak akan menurunkan daya beli konsumen. Pemilik kendaraan bermotor

akan membayar pajak lebih tinggi untuk kendaraan yang kedua dan seterusnya

akibat dikenakannya tarif progresif dalam PKB. Dengan dikenakannya tarif pajak

yang lebih tinggi bagi kendaraan kedua dan seterusnya dapat menurunkan tingkat

daya beli masyarakat atas kendaraan bermotor, khususnya pada kendaraan

bermotor roda empat (Ratnasari, 2015).

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali, I Made Santha mengatakan bahwa

pendapatan daerah Provinsi Bali dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor selama

tahun 2016 tidak dapat mencapai target. Hal ini karena tidak banyak masyarakat

Bali yang membeli mobil baru (www.tribunnews.com, 2015). Hipotesis ketiga

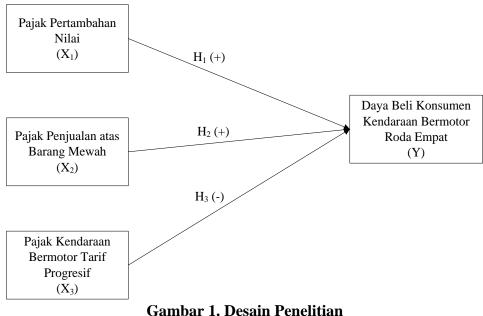
penelitian yaitu:

H3: Pengenaan PKB dengan tarif progresif berpengaruh negatif yang signifikan

pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat di Kota Denpasar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan bentuk asosiatif. Kantor SAMSAT Bersama Kota Denpasar dan Showroom kendaraan bermotor roda empat di Kota Denpasar adalah lokasi dilakukannya penelitian ini. Obyek dalam penelitian ini adalah daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat setelah dikenakan PPN, PPnBM, dan PKB dengan tarif progresif. Desain penelitian disajikan pada Gambar 1 berikut.



Sumber: Data Diolah 2016

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data-data kepemilikan kendaraan bermotor roda empat di Kota Denpasar, serta data kualitatif berupa pernyataan responden. Sumber data, data primer berasal dari jawaban responden pada kuesioner yang diberikan dan data sekunder yang berasal dari data-data kepemilikan kendaraan bermotor roda empat di Kota Denpasar. Variabel yang digunakan adalah PPN, PPnBM, dan PKB dengan tarif progresif sebagai variabel independen dan daya beli konsumen sebagai variabel dependen. Wajib pajak yang

membayar PKB di kantor SAMSAT Bersama Denpasar tahun 2015 dan konsumen potensial di Showroom yang ada di Kota Denpasar merupakan populasi dari penelitian ini, dimana jumlah populasi penelitian ini sebanyak 209.261 orang. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak di Kantor SAMSAT Denpasar dan konsumen potensial di Showroom kendaraan bermotor roda empat di Kota Denpasar. Proses penentuan sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling* dengan teknik *purposive sampling* sehingga memperoleh 100 orang responden. Kriteria penentuan sampel adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB roda empat dan mempunyai kendaraan bermotor roda empat lebih dari satu unit. Sampel diukur dengan rumus Slovin (Husein, 2008).

$$\mathbf{n} = \frac{N}{(1+N.e^2)} \tag{1}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e<sup>2</sup> = Nilai Kritis (batas ketelitian 0, 1)

Perhitungan sampel:

$$\mathbf{n} = \frac{209.261}{(1+209.261.(0,1)^2)}$$

n = 99, 9

n = 100 (dibulatkan)

PPN diukur dengan delapan buah indikator, yaitu tarif PPN, kepatuhan, pengenaan PPN, sistem pengenaan, nilai jual barang, harga barang, PKP, mekanisme pengenaan pajak. PPnBM diukur dengan delapan buah indikator, yaitu penggolongan, pengenaan, tarif, fungsi, pemungutan, pengenaan, PKP,

tujuan PPnBM. PKB tarif progresif diukur dengan enam buah indikator, yaitu tarif PKB, dasar pengenaan PKB, nilai jual, kepatuhan pembayaran pajak, denda pajak, bobot perhitungan PKB. Daya beli diukur dengan lima buah indikator, yaitu pendapatan, kemampuan masyarakat, harga, kebutuhan, dan kebijakan fiskal.

Metode pengumpulan data yakni dengan metode observasi *nonparticipant*. dan metode kuesioner. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner pada penelitian Dyah Ayuningtyas (2010) untuk variabel PPN, PPnBM, dan daya beli, serta kuesioner dari penelitian Nugraha (2012) untuk variabel PKP tarif progresif. Kuesioner penelitian diukur dengan menggunakan skala Ordinal, dengan skala empat poin.

Teknik analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi SPSS. Adapun model persamaannya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$
...(2)

Keterangan:

Y = Daya Beli Konsumen

X<sub>1</sub> = Pajak Pertambahan Nilai

X<sub>2</sub> = Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

X<sub>3</sub> = Pajak Kendaraan Bermotor

 $\alpha$  = Konstanta

 $\beta_x$  = Koefisien Regresi

Uji kualitas data yang digunakan adalah uji validitas yaitu untuk menguji apakah pernyataan dalam kuesioner valid atau tidak. Apabila nilai korelasi pearson lebih besar daripada 0,30 dan nilai signifikasi lebih kecil daripada nilai

alpha yang ditentukan yaitu 0,05, maka suatu variabel dikatakan valid. Uji

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel dapat dipercaya.

Apabilai nilai Cronbach Alpha lebih besar daripada 0,70, maka variabel dikatakan

reliabel.

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas

untuk mengetahui model regresi penelitian berdistribusi normal atau tidak.

Apabila nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar daripada 0,05, maka model regresi

berdistribusi normal. Pengujian lainnya yang digunakan adalah

heteroskedatisitas untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi perbedaan

variance dan residual satu pengamatan terhadap pengamatan lain. Apabila nilai

probabilitas diatas 0,05 maka bebas dari heteroskedatisitas. Uji multikolinieritas

untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat korelasi antar variabel

bebas, dilihat dari nilai toleransi yaitu  $\geq 0.10$  dan nilai VIF  $\leq 10$  yang artinya

bebas dari multikolinieritas.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diamati koefisien regresi

berganda yang disesuaikan (adjusted R square), uji F (uji kelayakan model), serta

uji t (uji hipotesis). Adjusted R square menunjukkan bagaimana kemampuan

model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai adjusted R square

berada diantara satu dan nol. Uji F bertujuan untuk menguji apakah model regresi

linear berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen layak digunakan. Apabila nilai signifikansi Anova ≤

0,05 maka model dari penelitian ini dikatakan layak digunakan untuk menjelaskan

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis menggunakan uji t

menjelaskan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual untuk menerangkan variasi variabel dependen. Taraf nyata yang digunakan adalah 5%. Penelitian ini menggunakan uji satu sisi, jika tingkat signifikansi t lebih besar dari  $\alpha$ =0,05 maka hipotesis ditolak. Sebaliknya jika signifikasi t lebih kecil atau sama dengan  $\alpha$ =0,05 maka hipotesis diterima.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyebaran 100 kuesioner yakni keseluruhannya kembali beserta pengisian yang lengkap serta memenuhi kriteria, maka tidak ada kuesioner yang gugur, sehingga menghasilkan *response rate* 100% dengan *useable response rate* sebesar 100%. Berdasarkan profil dari 100 responden yang mengisi kuesioner, didapatkan karakteristik responden penelitian diantaranya jenis kelamin, usia, pekerjaan, penghasilan, jumlah kendaraan roda empat yang dimiliki, dan status kepemilikan kendaraan.

Karakteristik responden penelitian ini yaitu wajib pajak di kantor SAMSAT dan konsumen potensial di Showroom kendaraan roda empat Kota Denpasar didominasi oleh laki-laki dengan selisih 34 responden dibandingkan perempuan. Kelompok usia terbanyak yaitu pada kelompok usia 36 - 45 tahun sebanyak 41 responden. Pekerjaan sebagai pegawai negeri menjadi profesi terbanyak yang menjadi responden pada penelitian ini, sebanyak 42 responden. Responden yang berpenghasilan lebih dari sepuluh juta mendominasi pada penelitian ini, yakni sebanyak 54 responden. Responden dengan jumlah kendaraan roda empat sebanyak empat buah menjadi jumlah kendaraan terbanyak pada penelitian ini, yaitu sebanyak 27 responden. Responden yang mengurus PKB dan

akan membeli kendaraan roda empat dengan status milik pribadi menjadi responden terbanyak dalam penelitian ini, yakni 78 responden.

Berikut ini akan diuraikan mengenai proses pengolahan data untuk menganalisis pengujian hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya dan memberikan uraian mengenai hasil pengolahan data yang diperoleh. Sebelum menjabarkan urutan pembahasan secara sistematis, dijabarkan terlebih dahulu mengenai pengujian statistik deskriptif terhadap masing-masing variabel penelitian. Kemudian menganalisis hasil uji kualitas data. Kemudian menganalisis hasil uji asumsi klasik, lalu menganalisis uji regresi linier berganda dengan pengujian koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), menilai kelayakan model regresi (uji F) untuk pengujian ketiga hipotesis yang ada dalam penelitian.

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang terdiri dari jumlah pengamatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan standar deviasi (Ghozali, 2013:19). Hasil statistik deskriptif disajikan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean.	Std. Deviasi
Pajak Pertambahan Nilai (X <sub>1</sub> )	100	8,00	30,67	24,0008	6,59686
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	100	8,00	31,78	24,4110	6,34230
$(X_2)$					
Pajak Kendaraan Bermotor dengan	100	6,00	22,57	10,7359	5,15372
Tarif Progresif $(X_3)$					
Daya Beli Konsumen (Y)	100	5,00	20,01	15,1078	4,05517

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel Pajak Pertambahan Nilai (X<sub>1</sub>) mempunyai nilai minimum PPN senilai 8, nilai maksimum PPN senilai 30,67,

nilai rata-rata PPN senilai 24,0008, dan standar deviasi sebesar 6,59686. Nilai standar deviasi menunjukkan jumlah penyimpangan sebesar 6,59686. Variabel Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (X<sub>2</sub>) mempunyai nilai minimum PPnBM senilai 8, nilai maksimum PPnBM senilai 31,78, nilai rata-rata PPnBM senilai 24,4110, dan standar deviasi sebesar 6,34230. Nilai standar deviasi menunjukkan penyimpangan sebesar 6,34230.

Variabel Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif (X<sub>3</sub>) mempunyai nilai minimum PKB senilai 6, nilai maksimum PKB senilai 22,57, nilai rata-rat PKB senilai 10,7359, dan standar deviasi sebesar 5,15372. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 5,15372. Variabel daya beli konsumen (Y) mempunyai nilai minimum senilai 5, nilai maksimum senilai 20,01, mean senilai 15,1078, dan standar deviasi sebesar 4,05517. Nilai standar deviasi menyajikan telah terjadi penyimpangan sebesar 4,05517.

Pengujian validitas dilaksanakan dengan menghitung nilai *pearson* correlation. Apabila nilai r pearson correlation terhadap skor total diatas 0,30, maka suatu instrumen akan dikatakan valid (Ghozali, 2013:55). Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	Pearson Correlation
Pajak Pertambahan Nilai	X <sub>1.1</sub>	0,797
	$X_{1.2}$	0,801
	$X_{1.3}$	0,900
	$X_{1.4}$	0,946
	$X_{1.5}$	0,940
	$X_{1.6}$	0,873
	$X_{1.7}$	0,787
	$X_{1.8}$	0,927
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	$X_{2.1}$	0,718
	$X_{2.2}$	0,771
	$X_{2.3}$	0,798
	$X_{2.4}$	0,859
	$X_{2.5}$	0,811
	$X_{2.6}$	0,894
	$X_{2.7}$	0,767
	$X_{2.8}$	0,878
Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tarif Progresif	$X_{3.1}$	0,877
č	$X_{3.2}$	0,957
	$X_{3.3}$	0,947
	$X_{3.4}$	0,906
	$X_{3.5}$	0,839
	$X_{3.6}$	0,929
Daya Beli Konsumen	$\mathbf{Y}_{1}$	0,927
•	$\mathbf{Y}_2$	0,855
	$\mathbf{Y}_3$	0,880
	$Y_4$	0,883
	$Y_5$	0,865

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Tabel 4 menunjukkan nilai *pearson correlation* setiap instrumen penelitian lebih dari 0,30 yang berarti pernyataan kuesioner valid.

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk memperlihatkan seberapa besar suatu alat pengukur dapat dipercaya yang dilaksanakan pada instrumen dengan koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu instrumen diakatan reliabel apabila nilai koefisiennya lebih besar daripada 0,70 (Ghozali, 2013:48). Hasil ujia reliabilitas disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Pajak Pertambahan Nilai (X <sub>1</sub> )	0,956
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (X <sub>2</sub> )	0,927
Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tarif Progresif (X <sub>3</sub> )	0,958
Daya Beli Konsumen (Y)	0,927

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Tabel 5 menunjukkan nilai koefisien *Cronbach's Alpha* pada variabelvariabel penelitian lebih besar daripada 0,70 yang berarti pernyataan kuesioner reliabel.

Uji normalitas dilaksanakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi (variabel dependen atau variabel independen ataupun keduanya) memiliki distribusi normal atau tidak dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2013:160). Apabilai nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar daripada *level of significant* yaitu 5% (0,05), maka data penelitian dapat dikatakan berdistribusi normal. Tabel 6 menyajikan hasil uji normalitas penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov	Unstandardized Residual		
N	100		
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,168		

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Tabel 6 diatas menyajikan nilai signifikansi 0,168 > 0,05 artinya model regresi berdistribusi normal.

Uji heteroskedatisitas dilakukan untuk memberikan informasi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:160). Apabila signifikansi t tiap variabel

bebas diatas 0,05, maka suatu model regresi akan dikatakan bebas dari heteroskedatisitas. Tabel 7 menyajikan hasil uji heteroskedatisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedatisitas

Variabel	Signifikansi
Pajak Pertambahan Nilai (X <sub>1</sub> )	0,180
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (X <sub>2</sub> )	0,254
Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tarif Progresif (X <sub>3</sub> )	0,502

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan Tabel 7 memperlihatkan nilai signifikansi setiap variabel bebas berada diatas 0,05. Hal ini berarti semua varibel bebas signifikan secara statistik tidak mempunyai pengaruh pada variabel dependen. Dapat dikatakan model regresi terbebas dari gejala heteroskedatisitas.

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah antar variabel bebas pada model regresi ditemukan adanya korelasi dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Apabila mempunyai nilai toleransi  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$ , maka suatu model regresi terbebass dari masalah multikolonieritas. Tabel 8 menyajikan hasil uji multikolonieritas.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Pajak Pertambahan Nilai (X <sub>1</sub> )	0,336	2,978
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (X <sub>2</sub> )	0,562	1,780
Pajak Kendaraan Bermotor dengan Tarif Progresif (X <sub>3</sub> )	0,311	3,218

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan Tabel 8, nilai *Tolerance* setiap variabel bebas lebih kecil daripada 0,10 dan nilai VIF senilai lebih besar daripada 10. Jadi tidak ada multikolonieritas pada model regresi penelitian ini.

Tabel 9 menyajikan hasil analisis regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan SPSS.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized		Standardized	t	Signifikansi
	Coeffiicients		Coefficients	_	
	В	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,293	2,650		2,753	0,007
Pajak Pertambahan	0,163	0,065	0,264	2,494	0,014
Nilai					
Pajak Penjualan Atas	0,247	0,052	0,386	4,710	0,000
Barang Mewah					
Pajak Kendaraan	-0,197	0,087	-0,250	-2,271	0,025
Bermotor dengan Tarif					
Progresif					
Adjusted R Square			0,626		
F hitung			56,266		
Signifikansi F			0,000		

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan Tabel 9, nilai *Adjusted R-Square* 0,626 artinya 62,60% variasi daya beli konsumen dipengaruhi oleh PPN (X<sub>1</sub>), PPnBM (X<sub>2</sub>), dan PKB dengan tarif progresif (X<sub>3</sub>), sedangkan sisanya sebesar 37,40% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Uji F dilaksanakan dengan membandingkan nilai signifikansi senilai 5 persen. Tabel 9 menunjukkan nilai signifikansi senilai 0,000 dibawah 0,05, berarti variabel independen dapat memaparkan fenomena variabel dependen, jadi dapat disimpulkan model penelitian ini layak diteliti.

Uji t dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian dengan tingkat signifikansi menggunakan taraf nyata (α) sebesar 0,05. Tabel 9 menyajikan nilai uji t variabel PPN 2,494, nilai signifikansi t 0,014 dibawah 0,05. Jadi H<sub>1</sub> diterima. Nilai uji t variabel PPnBM 4,710, nilai signifikansi t 0,000 dibawah 0,05.

Sehingga H<sub>2</sub> diterima. Nilai uji t variabel PKB tarif progresif -2,271, nilai

signifikansi t 0,025 dibawah 0,05. Sehingga H<sub>3</sub> diterima.

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis regresi linierr berganda, maka

persamaan regresi, yaitu:

$$Y = 7,293 + 0,163X_1 + 0,247X_2 - 0,197X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat dijelaskan hipotesis pertama

menyatakan PPN berpengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen

kendaraan bermotor roda empat. Tabel 9 menyajikan nilai signifikansi t senilai

0,014 lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai koefisien regresi 0,163. Hal ini berarti

PPN berpengaruh positif signifikan atas daya beli konsumen kendaraan bermotor

roda empat yang bertempat di Kota Denpasar, sehingga H<sub>1</sub> diterima.

Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan Dyah (2010), Fadilah

(2012), Fandy (2014), Raja (2014), dan Yunita (2015), yang membuktikan bahwa

pengenaan PPN berpengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen.

Masyarakat secara tidak langsung dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ketika

mengkonsumsi suatu barang atau jasa, dalam hal ini adalah kendaraan bermotor

roda empat. Tarif PPN sebesar 10% yang dikenakan pada setiap konsumsi

masyarakat merupakan suatu kebijakan pemerintah yang nantinya akan digunakan

untuk membiayai pengeluaran umum guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Setiap orang membutuhkan penghargaan prestise dari lingkungannya.

Kepemilikan kendaraan bermotor roda empat tentu saja akan menambah prestise

pemiliknya. Ketika membeli sebuah kendaraan bermotor roda empat masyarakat

akan mengutamakan kualitas dari kendaraan yang akan dibelinya. Semakin bagus kualitas kendaraan tersebut, semakin tinggi pula prestise pemiliknya yang tentu saja akan menyebabkan harga dari kendaraan tersebut semakin tinggi. Oleh karena itu nilai Pajak Pertambahan Nilai yang akan dikenakan pada kendaraan tersebut. Semakin tinggi harga sebuah kendaraan bermotor roda empat, maka nilai PPN pada kendaraan tersebut akan semakin tinggi pula.

Hipotesis kedua yaitu PPnBM berpengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat. Berdasarkan Tabel 9 nilai signifikansi t pada uji satu sisi untuk variabel Pajak Penjualan Atas Barang Mewah senilai 0,000 dibawah 0,05 dengan nilai koefisien regresi 0,247. Hal ini berarti bahwa PPnBM berpengaruh positif yang signifikan atas daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat yang bertempat di Kota Denpasar, sehingga H<sub>2</sub> diterima.

Fandy (2014), Raja (2014), Noviane (2015), Mariska (2015) menemukan bahwa PPnBM mempunyai pengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen, yang sejalan penelitian ini. Semakin tinggi nilai jual suatu kendaraan yang dikenakan PPnBM yang tarifnya lebih tinggi dari PPN, atau semakin mewah kendaraan tersebut secara signifikan akan mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor. Gengsi dan daya beli yang sangat menentukan pembelian kendaraan bermotor. Prestise merupakan salah satu kebutuhan seseroang yang bisa didapatkan dari lingkungannya. Kedudukan yang tinggi akan meningkatkan prestise seseorang. Walaupun memang belum semua masyarakat yang mengerti benar tentang PPnBM namun tidak menurunkan niat untuk membeli kendaraan

bermotor yang tergolong mewah, sebab kebutuhan gengsi sebagai penegasan dari

status sosial.

Hipotesis ketiga yaitu PKB dengan tarif progresif berpengaruh negatif

signifikan pada daya beli konsumen. Tabel 9 nilai signifikansi t pada uji satu sisi

untuk variabel Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif 0,025 dibawah

0,05 dengan nilai koefisien regresi -0,197. Oleh karena itu PKB tarif progresif

memiliki pengaruh negatif yang signifikan atas daya beli konsumen kendaraan

bermotor roda empat yang bertempat di Kota Denpasar, sehingga hipotesis ketiga

dalam penelitian ini diterima.

PKB dengan tarif progresif akan berpengaruh pada daya beli konsumen.

Konsumen akan merasa terbebani dengan adanya tarif PKB yang tinggi sesuai

dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki, sehingga mereka akan menekan

pembeliannya pada kendaraan bermotor roda empat. Penelitian ini mempunyai

hasil yang sama dengan Ratnasari (2015) yang menemukan PKB tarif progresif

berpengaruh negatif yang signifikan atas daya beli konsumen kendaraan bermotor

roda empat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis pengolahan data melalui program

SPSS versi 21.0 for Windows yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya,

maka simpulan penelitian yang menggunakan lokasi penelitian di Kota Denpasar

yaitu pengenaan PPN berpengaruh positif signifikan pada daya beli konsumen

kendaraan bermotor roda empat, pengenaan PPnBM memiliki pengaruh positif

signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat, dan

pengenaan PKB dengan tarif progresif mempunyai pengaruh negatif signifikan pada daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat.

Saran dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan adalah peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah wilayah penelitian dan juga dapat menambah variabel-variabel lainnya, baik variabel bebas maupun variabel moderasi. Saran bagi pemerintah adalah pemerintah juga sebaiknya lebih mengawasi praktik pemungutan ketiga pajak tersebut sehingga hasil pemungutannya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **DAFTAR REFEERENSI**

- Abdurrahman, Raja. 2014. Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Kota Tanjungpinang). *E-Jurnal Umrah*.
- Agung, Mulyono. 2011. Perpajakan Indonesia seri PPN dan PPnBM Teori Aplikasi Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmed, Masoom, Fazluz Zaman, Munshi Samaduzzaman. 2015. VAT Increase and Impact on Customer's Consumption Habit. *Asian Journal of Finance and Accounting*. Vol. 7 No. 1
- Aizenman, Joshua, Yothun Jinjarak. 2005. The Collection Efficiency Of The Value Added Tax: Theory And International Evidence. *National Bureau Working PaperI*. JEL No. F15, H21.
- Andrew, Hanson. 2012. Three Simple Reasons Why We Need Progressive Tax RatesPolici. Mic. *Research Analist*. Georgetown Public Policy Institute.
- Bahl, Roy W., & Linn, Johannes F. 1992. Urban Public Finance In Developing Countries. New York: Oxford University Press.
- Barr, N.A., James, S.R., & Prest, A.R. 1977. Self-Assessment for Income Tax. London, Heinemann.

- Bikas, Egidijus and Emile Andruskaite. 2013. Factors Affecting Value Added Tax Revenue. *1st Annual International Interdisciplinary Conference*. Faculty of Economics, Lithuania.
- Bradley, Caise Francies. 1994. An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior. *Disertation*. The University of Alabama, USA.
- Darmayanti, Novi. 2012. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. *Skripsi*.
- Diamond, Peter A and E. Saez, 2011. The Case for a Progressive Tax: From Basic Research to Policy Recommendations. *Journal of Economic Perspectivesi*. Vol. 25 No. 4.
- Dinas Pendapatan. 2016. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengenaan Pajak Progresif Untuk Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP).
- Direktur Jenderal Pajak. 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-57/PJ/2013 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.011/2013 Tentang Jenis Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Dyreng, Scott D dkk. 2010. The Effects og Executives on Corporate Tax Avoidance. *The AccontingReview*. Vol. 85 No. 4, pp: 1163-1189.
- Ebrill, Liam. Michael Keen, Jean-Paul Bodin, nd Victoria Summers. 2002. The Allure of The Value Added Tax. *Finance & Development*. 39 (2), pp: 44.
- Ermawati, Eka, Ni Putu Eka Widiastuti. 2014. Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta. *Jurnal InFestasi*. Vol. 10 No. 2, pp:103-114.
- Evina, Sutra, Lili Syafitri, Cherrya Dhia Wenny. 2014. Pengaruh Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kendaraan Bermotor Roda Dua Terhadap Daya Beli Konsumen di Kota Palembang. *Jurnal STIE MDP*.
- Fadilah. 2012. Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronika (Studi Empiris pada Konsumen Barang Elektronika di Glodok Jakarta Kota). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Faizal. 2010. Sistem Informasi Pengolahan Data Pajak Kendaraan Bermotor Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Menggunakan Visual Basic. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 15 No. 1.
- Fajariani. 2013. Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan "The Four Maxims". *Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya*.
- Fernandez, Prafula and Pope, Jeff. 2002. International Taxation of Multinational Enterprises (MNEs). *Renemue Law Journal*. Vol. 12: Iss. 1, Article 7.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS* 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, Dyah Ayuningtyas Tria. 2010. Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen pada Barang Elektronika (Studi Empiris pada Konsumen Barang Elektronika di Wilayah Tangerang Selatan). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B., Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Jayakumar, A., 2012. A Study on Impact of Value Added Tax (VAT) Implementation in India. *World Journal of Social Science*. Vol 2 No. 5, pp: 145-160.
- Jefta, Israelka. 2011. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt.Kaltimex Lestari Makmur. *E-journal Economic*. Vol.3 No.5.
- Joel, b. Slemrod. 2002. Do We Know How Progressive the Income Tax System Should Be?. *National Tax Journal*. Vol.36 No. 3.
- Johnson, Gregory and Sare Piennar. 2013. Value Added Tax on Virtual World Transactions: A South African Perspektive. *International Business and Economics Research Journal*. 12 (1), pp: 71-78.
- Komal. 2013. An Analysis of the Impact of Value Added Tax (VAT) in Delhi. Global Journal of Management and Business Studies. Vol. 3 No.3, pp: 277-286.
- Kunert dan Kuhfeld. 2007. The diverse structures of passenger car taxation in Europe and the EU Commissions proposal for reform. *Transport Policy*. Vol. 14 No. 4, pp: 306-316.
- Lestari, Nur Wachida Cinitya. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

- (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Kepulauan Selayar). *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar.
- Livingstone, M.A., 2006, Progressive Taxation in Developing Economies: The Experience of China and India, Annual Confrence. *International AtlanticEconomic Society*, IAES., Philadelphia P.A.
- Lukman, Jamila Fitrahma Aisyah. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pangkep. *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Mariska, Febe. 2015. Analisis Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Barang Elektronika (Studi Empiris pada Konsumen Barang Elektronika di Wilayah Jalan ABC Kota Bandung). *Skripsi* Universitas Kristem Maranatha.
- Martowardojo, Agus. 2012. Enam Langkah Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak. <a href="https://m.tempo.co/read/news/2012/08/18/090424368/enam-langkah-pemerintah-genjot-penerimaan-pajak">https://m.tempo.co/read/news/2012/08/18/090424368/enam-langkah-pemerintah-genjot-penerimaan-pajak</a>. Diunduh tanggal 8, bulan Oktober, tahun 2016
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/ PMK 0.10/ 2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Mughal, Muhammad Muazzam dan Muhammad Akram. 2012. Reasons Of Tax Avoidance and Tax Evasion From Pakistan. *Journal of Economics and Behavioral Studies*. Vol. 4. No. 4, pp: 217-222.
- Mujiati. 2015. Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Jepara. *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*.
- Murthi, Ngurah Wisnu, Made Kembar Sri Budhi, Ida Bagus Purbadharmaja. 2015. Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Perilaku Konsumtif, Basis Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 4 No. 12, pp: 1001-1048.
- Nugraha, Harist Agung. 2012. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota). *Jurnal Ilmiah*.

- Pamungkas, Hanggoro. 2011. Peranan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Transportasi Kota Besar. *Jurnal BINUS University*.
- Pheni, Yurida. 2012. Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bekas di DKI Jakarta. *Skripsi* Universitas Indonesia.
- Prabowo, Fandy Prasetiyo. 2014. Pengaruh Penerapan PMK No-121/PMK.011/2013 atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen pada Barang Elektronika (Studi Empiris Konsumen Barang Elektronika di Wilayah DKI Jakarta). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Provinsi Bali. 2011. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Ratnasari, Ida Ayu Putri. 2015. Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 15 No. 2, pp: 887-914.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Ridwan dan Kuncoro Engkos Ahmad. 2008. Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analisys). Bandung: CV Alfabeta.
- Santha, Made. 2015. Krama Bali Sudah Jarang Beli Mobil, Pendapatan Pajak Minus. <a href="http://bali.tribunnews.com/2015/12/12/krama-bali-sudah-jarang-beli-mobil-pendapatan-pajak-minus">http://bali.tribunnews.com/2015/12/12/krama-bali-sudah-jarang-beli-mobil-pendapatan-pajak-minus</a>. Diunduh tanggal 30, bulan Juni, tahun 2016.

- Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R., 2008. Concept Of Taxtation. Edition Orlando Florida. Dryden Press: Harcourt Brace.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, Untung. 2011. Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumbur, Noviane Claudya Pinkan, Julie J Sondak, Harijanto Subijono. 2015. Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat dan Roda Dua PT Hasrat Abadi Manado). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 15 No. 05.
- Suryono. 2014. Kenaikan Pajak Kendaraan Berpotensi Pengaruhi Penjualan Mobil 2015. <a href="http://www.kemenperin.go.id/artikel/10425/Kenaikan-Pajak-Kendaraan-Berpotensi-Pengaruhi-Penjualan-Mobil-2015">http://www.kemenperin.go.id/artikel/10425/Kenaikan-Pajak-Kendaraan-Berpotensi-Pengaruhi-Penjualan-Mobil-2015</a>. Diunduh tanggal 30, bulan Juni, tahun 2016.
- Tripathi, Rivandra, Ambalinka Sinha, Sweta Argawal. 2011. The Effect of Value Added Tax on the Indian Society. *Journal of Accounting and Taxation*. Vol. 3 No. 2, pp. 32-39.
- Utami, Kadek Yunita. 2015. Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Alat Fotografi (Studi Empiris pada Perhimpunan Amatir Foto di Kota Bandung). *Skripsi* Universitas Kristem Maranatha.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, Budi Kusuma, Kharis Raharjo, Rita Andini. 2016. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2008-2014). *Journal Of Accounting*. Vol. 2 No. 2.